

MENILIK KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI TERHADAP KOMPLEKSITAS DAN FENOMENA

¹Nabiela Rizki Alifa, & ²Adhi Rahmadian

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: nabielarizki@uinsgd.ac.id, & adhirahmadian@outlook.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memiliki potensi ekonomi dan keanekaragaman laut yang besar. Salah satu sektor vital di negara ini adalah sektor perikanan, yang menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas nelayan. Nelayan merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor perikanan, berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Meskipun demikian, kesejahteraan nelayan belum baik karena berbagai faktor dalam sektor tersebut. Penelitian ini menyoroti kondisi nelayan di Indonesia dengan berbagai paradigma yang terkait dengan pekerjaan mereka di sektor perikanan. Paradigma-paradigma ini dieksplorasi menggunakan pendekatan deskriptif, terutama dalam konteks pengelolaan pendapatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan kunci yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendapatan nelayan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, upaya-upaya seperti peningkatan akses terhadap sumber daya dan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan diusulkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi nelayan dalam rantai nilai perikanan dan meningkatkan pengelolaan pendapatan mereka. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih baik tentang paradigma pengelolaan pendapatan nelayan di Indonesia serta pentingnya pengembangan kebijakan yang berlandaskan pada konteks lokal dan mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan.

Kata Kunci: Nelayan Indonesia, Pengelolaan Pendapatan, Peningkatan Kesejahteraan, Paradigma Nelayan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar di seluruh dunia, yang terdiri dari lima pulau utama dan 30 pulau kecil, dengan total sekitar 17.504 pulau, 8.651 pulau sudah diberi nama, 8853 pulau belum diberi nama, dan 9.842 pulau telah ter-diversifikasi (Alfath, 2020). Kondisi geografis yang strategis membentang sejauh 5.150 km antara benua Australia dan Asia serta membelah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di bawah gariskhatulistiwa (Darmawan, 2020). Wilayah Indonesia mencakup area daratan dan perairan yang meliputi: perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan bawahanahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (UU Pertimbangan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, LNRINomor 177 Tahun 2008). Luas area perairan Indonesia sebagian besar dan mencakup area laut seluas 5,8 juta km² atau

70% dari wilayah (Adiananda, 2019). Dengan kondisi seperti ini, selain sebagai negara kepulauan, Negara Indonesia juga dikatakan sebagai Negara Maritim.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki area laut di mana terdapat potensi ekonomi dan keanekaragaman laut yang sangat besar. Setidaknya ada 13 sektor di laut yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi dan kemakmuran masyarakat Indonesia, yaitu (a) Perikanan Tangkap; (b) Akuakultur (c) Industri Pengolahan Akuakultur; (d) Industri Bioteknologi Laut (e) Pertambangan dan Energi; (f) Pariwisata Laut; (g) Transportasi Laut; (h) Jasa Industri dan Maritim (i) Pulau-pulau Kecil; (j) Sumber Daya Non-Konvensional; (k) Pembangunan Kelautan; (l) Benda Berharga dan Warisan Budaya; (m) Konversi Layanan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati (Fauzil, 2024).

Perikanan termasuk salah satu dari 13 sektor perikanan yang menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar nelayan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun, atau sekitar 60% dari total potensi sumber daya ikan nasional yang berasal dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Rohmin Danuri). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 5.700.000 ton, tahun 2021 sebesar 6.100.000 ton, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6.400.000 ton. Jika diperhatikan akuisisi atau produksi tangkapan ini setiap tahunnya, terjadi peningkatan dalam produksi perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Total luas perairan Indonesia sekitar 7,1 juta kilometer persegi, dan jumlah nelayan di Indonesia hingga tahun 2020 tercatat sekitar 15 juta orang dengan total armada sebanyak 570.000 unit. Dari jumlah tersebut, 90 persen atau 513.000 armada merupakan kapal penangkap ikan kecil dengan berat mati di bawah 30 *Gross Tonnage* (GT) (Samsudin, 2021). Dari total produksi perikanan tangkap yang terus meningkat dari tahun ke tahun, nelayan cenderung meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga tingkat kesejahteraan nelayan juga meningkat. Pendapatan nelayan sendiri adalah total hasil yang diterima setelah dikurangi total biaya operasional atau juga biasa disebut dengan keuntungan (Siskawati, Rizal, & Pribadi, 2016)

Namun, hal ini hanyalah asumsi dikarenakan nelayan di Indonesia masih belum sepenuhnya sejahtera karena pola perilaku mereka sangat merugikan. Budaya yang ada dalam dunia perikanan di Indonesia adalah hasil dari penelitian tentang keluarga karena masih banyak keluarga pesisir (nelayan) dengan kondisi keuangan defisit. Biasanya jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, kelebihan pendapatan atau keuntungan digunakan untuk membeli tabungan atau aset keluarga lainnya. Namun, nilai aset dan tabungan dari keluarga nelayan ternyata lebih rendah daripada nilai aset dan tabungan dari keluarga non-nelayan. Hal ini disebabkan karena surplus pendapatan keluarga lebih banyak digunakan oleh nelayan atau suami nelayan untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga tidak semua pendapatan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran keluarga. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa pria seringkali menyimpan sebagian dari pendapatan mereka dan menghabiskannya untuk kepentingan pribadi mereka (Falkingham & Baschieri 2009).

B. KAJIAN PUSTAKA

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah sudut pandang tentang diri dan lingkungan akan memengaruhi pemikiran (kognitif), keberadaan (afektif), dan tindakan (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam melihat realitas dalam suatu komunitas. (Kuhn, 2012) Selain itu, Robert Friedrichs mengatakan bahwa Paradigma adalah seperangkat nilai-nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik awal sehingga akan membentuk pandangan gambaran subjektif seseorang tentang realitas dan pada akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realitas tersebut. Dengan demikian, sebuah paradigma akan memengaruhi kebiasaan atau perilaku setiap orang.

Nelayan sebagai komunitas yang unik tidak dapat dipisahkan dari paradigma atau adat lokal yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut penelitian Muflikhati (2010), mengenai perilaku atau kebiasaan nelayan pesisir terkait dengan sektor ekonomi, terutama pendapatan. Paradigma dan kebiasaan gaya hidup nelayan dalam pengeluaran pendapatan mereka dapat dinilai berlebihan. Hal ini juga terkait dengan bagaimana mereka mengalokasikan pendapatan untuk tujuan yang mereka anggap menarik dibandingkan untuk kebutuhan mereka yang benar-benar membutuhkan. Mengingat dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Retnowati, 2011).

Pada akhirnya, hal ini akan memengaruhi dua konsep utama yaitu kemiskinan dan kesejahteraan. Kesejahteraan di definisikan sebagai kualitas hidup atau unit sosial lainnya (Imron 2003), sejalan dengan yang didefinisikan (Anwar & Wahyuni 2019). Kualitas hidup individu terdiri dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Menurut Sumarwoto, ada empat faktor yang memengaruhi kualitas hidup seperti faktor diversifikasi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan kemampuan untuk menjamin stabilitas hak-hak pembangunan. Jika kesejahteraan didefinisikan sebagai pemenuhan materiil dan spiritual yang layak, maka kemiskinan adalah sebaliknya. Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dan studi literatur lalu diolah dengan analisis deskriptif. Data statistik ini dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis konsep utama terkait alokasi pendapatan untuk nelayan. Selain itu, kami juga menggunakan studi literatur dari buku-buku, serta jurnal ilmiah untuk mencari konsep-konsep yang tepat mengenai paradigma nelayan tentang alokasi pendapatan yang baik. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan menentukan kinerja perikanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir, serta risiko-risiko yang timbul bersamanya. Dengan menggunakan data dan fenomena yang ada, peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada nelayan Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa definisi nelayan adalah orang yang melakukan usaha perikanan dimana usaha perikanan tersebut dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga tahun 2021, terdapat 2.359.264 orang nelayan dengan total armada sebanyak 570.000 unit. Dari total jumlah tersebut, 90% adalah perahu nelayan kecil dengan bobot di bawah 30 GT, dan sebenarnya sebagian besar penangkapan ikan (nelayan tradisional), nelayan kecil, dan penyewa nelayan, yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsistem), kecuali perusahaan perikanan yang menangkap ikan untuk tujuan bisnis atau komersial dengan menggunakan kapal lebih dari 30 GT.

Banyaknya nelayan kecil dan tradisional yang melebihi kapasitas tangkapan ikan dapat memicu potensi *overfishing* (penangkapan ikan berlebihan), hal ini disebabkan karena area penangkapan ikan tradisional nelayan kecil terbatas atau tidak sebanding dengan luasnya area penangkapan ikan. Kondisi seperti ini juga dapat menyebabkan konflik diantara nelayan untuk memperebutkan wilayah tangkapan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah salah satunya adalah memberikan bantuan kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 10 GT agar mereka dapat menangkap ikan dengan jangkauan yang lebih luas dari sebelumnya.

Populasi nelayan kecil dan tradisional yang melampaui kapasitas tangkapan ikan di area terbatas memicu *overfishing* dan konflik antar nelayan. Jam kerja singkat dan keterbatasan kapal serta peralatan penangkapan ikan menghasilkan tingkat produksi dan pendapatan yang rendah bagi nelayan. Kurangnya data dan informasi tentang nelayan ini menghambat pengembangan kebijakan yang tepat oleh pemerintah.

Meskipun potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia sangat besar, kemampuan dan budaya penangkapan ikan masih terbatas. Sektor perikanan dapat menjadi sumber ekonomi yang signifikan jika dikelola secara optimal oleh nelayan Indonesia. Diperlukan solusi komprehensif yang mengatasi berbagai aspek, seperti penataan kapasitas tangkapan, modernisasi kapal dan peralatan, perubahan pola kerja, pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, pengumpulan data, dan pengembangan kebijakan berbasis data. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif nelayan sangat penting untuk merumuskan dan melaksanakan solusi yang efektif. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, sektor perikanan Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan sosioekonomi yang signifikan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.

Melihat kondisi sektor perikanan khususnya pada jumlah nelayan, dapat digunakan sebagai penilaian atau indikator bahwa sektor perikanan di Indonesia masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan penangkapan ikan skala kecil. Diperlukan langkah-langkah untuk mengubah situasi, budaya kerja, dan peningkatan keterampilan mereka agar total tangkapan ikan dapat ditingkatkan. Seperti halnya dengan nelayan di Indonesia, mereka merupakan salah satu pihak yang masih terpinggirkan karena mereka tidak memiliki adaptasi yang baik seperti nelayan di Jepang dan Malaysia. Dalam arti nelayan Indonesia masih belum memahami penggunaan teknologi meskipun pemerintah telah memberikan subsidi untuk teknologi tersebut.

Paradigma Nelayan

Profesi nelayan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang atau Malaysia. Di negara-negara tersebut, profesi nelayan memerlukan keahlian dan

konsistensi tinggi, sehingga tingkat kehidupan nelayan di sana tergolong sejahtera. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, pendapatan per kapita nelayan di Indonesia hanya sebesar \$1.338 per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita nelayan di Jepang (\$62.833) dan Malaysia (\$11.100). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan di Indonesia adalah karena masih banyaknya nelayan tradisional dengan penangkapan ikan skala kecil. Nelayan tradisional umumnya memiliki keterbatasan dalam keahlian dan teknologi penangkapan ikan. Hal ini menyebabkan produktivitas mereka rendah dan sulit untuk bersaing dengan nelayan skala besar. Selain itu, nelayan tradisional juga seringkali terkendala oleh akses pasar yang terbatas dan harga ikan yang fluktuatif. Hal ini digambarkan sebagai kompleksitas dan keragaman kondisi kehidupan nelayan di berbagai wilayah.

Rata-rata pendapatan nelayan di Indonesia memang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan orang yang bukan nelayan. Data Muflikhati (2010) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga nelayan di daerah Pantura mencapai 2,7 juta rupiah per bulan, sedangkan rata-rata pendapatan keluarga bukan nelayan hanya 1,7 juta rupiah per bulan. Namun, perlu diingat bahwa data ini hanya mewakili sampel kecil dari populasi nelayan di Indonesia. Selain itu, rata-rata pendapatan tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Artinya, meskipun rata-rata pendapatan nelayan tergolong tinggi, masih terdapat banyak nelayan yang hidup dalam kemiskinan.

Kondisi yang tidak sejahtera bukan hanya digambarkan berdasarkan tingkat pendapatan. Faktor lain seperti akses terhadap layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan juga perlu dipertimbangkan. Dibeberapa daerah pesisir, nelayan mungkin memiliki pendapatan yang tergolong tinggi dari hasil tangkapan ikan. Namun, mereka mungkin tidak memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, atau layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, anak-anak nelayan mungkin tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas karena harus membantuarang tua mereka bekerja di laut.

Keragaman kondisi kehidupan nelayan di Indonesia berdampak pada taraf hidupnya. Nelayan di daerah yang kaya sumber daya ikan mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan nelayan di daerah yang sumber daya ikannya terbatas. Nelayan yang memiliki akses terhadap teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien juga kemungkinan besar memiliki pendapatan yang lebih tinggi.

Kesejahteraan

Upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesejahteraan nelayan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga kualitas hidup yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan pendidikan, nelayan dapat (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penangkapan ikan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. (2) Memahami teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien untuk meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi biaya produksi. (3) Meningkatkan akses terhadap informasi pasar untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka. (4) Mengembangkan keterampilan

lain di luar penangkapan ikan, seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, atau pariwisata laut, untuk diversifikasi pendapatan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ialah diversifikasi ekonomi. Nelayan dapat mengembangkan usaha sampingan di luar penangkapan ikan, seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, atau pariwisata laut. Membentuk koperasi untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam menjual produk mereka. Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal lainnya, seperti perdagangan atau jasa.

Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa nelayan yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki pendapatan yang 30% lebih tinggi daripada nelayan yang tidak berpendidikan. Hasil ini juga diperkuat dari studi JICA menunjukkan bahwa nelayan yang mendiversifikasi pendapatan mereka memiliki ketahanan pangan yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi guncangan ekonomi.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kompleksitas profesi nelayan di Indonesia, dengan fokus pada kesejahteraan mereka yang berangkat dari paradigma pengelolaan pendapatan nelayan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun rata-rata pendapatan nelayan di Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan nelayan, namun distribusi pendapatan yang tidak merata, akses terhadap layanan dasar yang terbatas, dan keragaman kondisi kehidupan di berbagai daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kesejahteraan nelayan.

Selanjutnya, pendidikan dan diversifikasi ekonomi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dimana ketika pengelolaan pendapatan nelayan dilakukan dengan baik maka pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dapat terwujud. Sedangkan upaya diversifikasi ekonomi juga dapat membuka peluang baru dan menambah pendapatan nelayan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pendidikan dan diversifikasi ekonomi nelayan, namun masih banyak yang perlu dilakukan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, menurunkan biaya modal untuk usaha sampingan, dan membangun infrastruktur yang memadai di daerah pesisir.

Peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang efektif, kesejahteraan nelayan di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiananda, I. D. A. M., Pratama, I. G. E. B., & Utama, I. A. B. M. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Universitas Airlangga*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>

- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10622>
- Darmawan, W. B., Alkadrie, J., & Sudirman, A. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 1(3), 287-310. DOI:10.24198/padjir.v1i3.26242
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Statistik. Diakses dari <https://statistik.kkp.go.id/>
- Falkingham, J., & Baschieri, A. (2009). Gender and poverty: how misleading is the unitary model of household resources? An illustration from Tajikistan. *Global Social Policy*, 9(1), 43-62.
- Fauzil, M. Y., & Burhanuddin, A. (2024). Prospek Hubungan Maritim Indonesia –Malaysia Pasca Kesepakatan Batas Laut 2023. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.864>
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2017). Faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 3(1), 62-67.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.259>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2022. Diakses dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6>
- Kuhn, T. S. (2012). *The Structure of Scientific Revolutions (50th Anniversary Edition, Fourth Edition)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Muflikhati, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Tawangrejo Kecamatan Tawangrejo Kabupaten Malang. *Jurnal Agrikultur dan Bisnis*, 2(2), 145-154.
- Parenrengi, S., Yunas, S., & Hilmiyah, N. (2020). Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(1), 93-104.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Samsudin, R. M. (2021). Pengaruh Jumlah Nelayan dan Jumlah Kapal terhadap Produksi Perikanan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuatek*, 2(1), 45-50.



Siskawati, D., Rizal, A., & Prihadi, D. J. (2016). Analisis Pendapatan Nelayan Jaring Insang Tetap dan Bubu Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 7(2).